

**DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI (KKDN) SETJEN WANTANNAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN GUNA PENGAMANAN
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEAMANAN NASIONAL
TANGGAL 13 – 16 JUNI 2022**

JAKARTA, JUNI 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI (KKDN) SETJEN WANTANNAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN GUNA PENGAMANAN WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEAMANAN
NASIONAL
TANGGAL 13 – 16 JUNI 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional (Hamid dalam Mulki, 2015:7). Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan regional maupun antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah yang dapat mendorong naiknya aktivitas produksi masyarakat dan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Letak kawasan yang berhadapan secara langsung dengan negara lain menyebabkan kawasan perbatasan rawan terhadap intervensi dari negara lain, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosio-kultural, maupun keamanan. Oleh karena itu, pendekatan kesejahteraan yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan dan lingkungan menjadi sebuah kebutuhan dasar dalam pengelolaan perbatasan.

Berbicara tentang perbatasan, salah satu pulau yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga adalah Pulau Kalimantan. Pada dasarnya, garis batas darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan berupa garis batas alamiah (punggung gunung) yang mengikuti garis pemisah air (*watershed*), dimulai dari pantai timur di Selat Sekapal (Kalimantan Timur-Sabah) ke arah barat sampai Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat-Serawak). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus mengatur pengelolaan perbatasan di Kalimantan. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan secara eksplisit menetapkan sembilan (9) kawasan perbatasan darat dan laut di Kalimantan. Secara administratif, kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia meliputi dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Untuk wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, perbatasan dengan Serawak, Malaysia, sepanjang ±966 km melintasi lima belas kecamatan yang tersebar di lima kabupaten. Dan salah satu titik lintas batas di Provinsi Kalimantan Barat yang cukup ramai adalah Entikong. Kecamatan Entikong merupakan salah satu kawasan perbatasan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Entikong berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Entikong dianggap memiliki nilai strategis sebab Entikong mempunyai beberapa komoditas unggulan mulai dari pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

Wilayah Kawasan Kecamatan Perbatasan Entikong, Indonesia-Tebedu, Malaysia merupakan wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara dua negara yang memiliki kesamaan budaya, tetapi dengan keadaan ekonomi kontras. Di kawasan kecamatan perbatasan Entikong-Sekayam tersebut Suku Melayu, Dayak dan Cina telah saling berinteraksi satu sama lainnya sejak zaman dahulu. Setelah negara Indonesia dan Malaysia merdeka, interaksi mereka terpisah oleh wilayah administrasi kedua negara. Pertumbuhan ekonomi Sarawak cukup tinggi, dengan titik berat pembangunan terletak pada bidang pertanian, dan perdagangan serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara optimal. Fasilitas di Sarawak seperti pendidikan cukup banyak tersedia, lengkap disertai program beasiswa bagi siswa berprestasi. Gedung, rumah dan jalanan rapi dan teratur di wilayah Sarawak, Malaysia.

Fenomena kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dua negara dapat dilihat di Entikong. BPS (2017) mencatat masih terdapat 723 jiwa jumlah keluarga pra sejahtera di Kecamatan Entikong dan Sekayam. Tingkat kesejahteraan yang rendah di kawasan perbatasan berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, prostitusi, kependudukan dan kriminalitas di Entikong. Data BPS (2021) menunjukkan kasus penyelundupan narkoba mendominasi tindak pidana yang ditangani Polsek Entikong sepanjang tahun 2020 dengan jumlah 7 dari total 12 kasus tindak pidana. Di bidang kependudukan, fenomena kewarganegaraan ganda di Entikong juga terlihat. Di sisi lain, infrastruktur jalan, transportasi, listrik dan komunikasi juga masih tidak merata. Di Desa Suruh Tembawang dan Pala Pasang, misalnya, data BPS (2021) melansir tidak adanya angkutan umum yang beroperasi di wilayah tersebut dengan kondisi jalan masih belum beraspal.

Belum lagi, sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Entikong juga terbilang rendah. Laporan BPS (2021) menyebutkan tidak adanya dokter yang berpraktik di wilayah tersebut. Tercatat hanya ada 3 fasilitas kesehatan yang tersedia yakni puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Akibatnya, akses masyarakat ke rumah sakit ataupun rumah sakit bersalin sangat sulit. Tidak mengherankan kemudian, apabila masyarakat lebih memilih ke wilayah Malaysia untuk berobat. Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi serta ketergantungan yang tinggi terhadap negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara tidak langsung dapat menggerus wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa (Purwanto dan Syawie, 2013).

Pembangunan kawasan di daerah perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan dengan serius. Kecamatan Entikong yang berada di kawasan perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis. Dengan selesai dibangunnya PLBN Entikong di tahun 2016, aktivitas perdagangan legal meningkat cukup signifikan. Namun peningkatan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan aktivitas perdagangan ilegal mengingat masih banyak jalur tidak resmi (jalan tikus) yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ilegal. Di sisi lain, masyarakat juga butuh membeli barang sehari-hari, akses menjual hasil pertanian, membeli pupuk, bibit dan makanan ternak, dll.

Seiring berakhirnya Perang dingin, fokus negara bergeser pada sektor ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan manusia. Perhatian terhadap ancaman non militer mengalami peningkatan. Konsekuensinya, pergeseran ini menyediakan tantangan sekaligus kesempatan pada negara untuk memberi atensi pada keamanan manusia

(Raju, 2020). Karena itu, guna memperkokoh pertahanan negara maka keberadaan masyarakat yang kuat menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Lebih lanjut, dalam konsep Perdagangan Lintas Batas (PLB) disebutkan bahwa perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang di produksi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Konsep ini masih perlu dipertahankan, karena masyarakat Indonesia di daerah perbatasan Entikong masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Malaysia. Sebagian besar kebutuhan sehari-hari masyarakat diperoleh dari berbelanja di daerah Malaysia, terutama dari Tebedu. Hal ini sangat membantu masyarakat, karena jika mereka berbelanja di wilayah Indonesia, seperti di Sanggau (ibukota Kabupaten) atau di Pontianak (ibukota Propinsi), perjalanannya cukup jauh dan menghabiskan biaya transportasi yang cukup besar.

Pembangunan fisik berupa kantor PLBN, Terminal Darat Internasional dan sejumlah infrastruktur lainnya sebenarnya merupakan salah satu strategi yang sangat tepat. Akan tetapi, langkah tersebut tetap harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia dan kearifan lokal lainnya. Dalam konteks ini, mencari solusi dan upaya alternatif guna memperkuat atensi terhadap keamanan manusia di wilayah perbatasan menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan KKDN dimaksudkan untuk melihat secara langsung tentang Pemberdayaan masyarakat perbatasan guna pengamanan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan keamanan nasional.

b. Tujuan

Laporan KKDN disusun dengan tujuan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang menonjol untuk kemudian dianalisis dan diusulkan berupa rekomendasi guna memperkuat pemberdayaan masyarakat perbatasan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan keamanan nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada kajian yang berkaitan dengan permasalahan menonjol yang dihadapi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat perbatasan guna pengamanan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan keamanan nasional.

4. Tata Urut

Tata urut laporan KKDN ini disusun sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan
- b. Bab II. Pelaksanaan
- c. Bab III. Analisis

d. Bab IV. Penutup

5. Metode dan Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dan fakta adalah kunjungan *on the spot*, tatap muka tatap muka dengan pejabat daerah, pelaku industri serta dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sedangkan dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap data dan fakta yang terkumpul digunakan pendekatan analisis deskriptif.

BAB II PELAKSANAAN

1. Peserta KKDN

- | | |
|---|-----------|
| a. Laksda TNI Udyatmiko (Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan) | - Ketua |
| b. Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M. Eng (Staf Ahli Bidang IPTEK) | - Anggota |
| c. Mayjen TNI Eddy Syahputra Siahaan, S.IP., M.M (Staf Ahli Bidang Sosial Budaya) | - Anggota |
| d. Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.IP., M.M., M.A., (GSC) (Staf Ahli Bidang Ekonomi) | - Anggota |
| e. Irjen Pol. I Nyoman Suradnya, M.M (Staf Ahli Bidang Hukum) | - Anggota |
| f. Anton Aliabbas, Ph. D (Dosen Universitas Paramadina) | - Anggota |
| g. Roy Wariko S. Kom (Staf TU Sahli) | - Anggota |
| h. Sartono (Staf TU Sahli) | - Anggota |

2. Waktu Pelaksanaan KKDN

Pelaksanaan KKDN ke Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama empat hari, yaitu mulai tanggal 13 – 16 Juni 2022 dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Tanggal 13 Juni 2022

- 1) Penerbangan Jakarta – Pontianak, Kalimantan Barat;
- 2) Audensi kepada Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Kunjungan ke Markas Kodam XII/Tanjung Pura.

b. Tanggal 14 Juni 2022

- 1) Kunjungan ke Kantor Polda Kalimantan Barat;

- 2) Kunjungan ke Markas Lantamal XII/Pontianak;
- 3) Kunjungan ke Kantor PT. Pelindo II
- 4) Kunjungan ke Kantor PT. Pertamina Pontianak

c. Tanggal 15 Juni 2022

- 1) Kunjungan ke PLBN Entikong.

d. Tanggal 16 Juni 2022

Penerbangan Pontianak – Jakarta.

3. Sasaran KKDN

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Polda Kalimantan Barat;
- c. Kodam XII/Tanjungpura;
- d. Lantamal XII/Pontianak;
- e. PT. Pelindo II Pontianak (Obvitnas)
- f. PT. Pertamina (Obvitnas)
- g. Pos Lintas Batas Negara Entikong (Obvitnas)

4. Kondisi Umum dan Isu-isu Strategis Daerah Kunjungan

a. Aspek Geografis dan Demografis

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Kalimantan, dengan pusat pemerintahan berada di kota Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km². Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa, dengan kepadatan 37 jiwa/km². Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Selain itu, Kalimantan Barat juga memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan hasil perkebunan diantaranya karet, kelapa sawit, kelapa dan lidah buaya. Produksi perikanan tangkap di Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kota Pontianak.

Terkait perbatasan darat dengan Malaysia, terdapat beberapa daerah yang sudah mempunyai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis seperti PLBN Aruk (Sambas), PLBN Entikong (Sanggau) dan PLBN Nanga Badau (Kapuas Hulu).

Pendirian PLBN ini berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2015. Isu strategi yang membutuhkan atensi antara lain: lambatnya pembangunan PLBN Jagoi Babang (Bengkayang) dan PLBN Sei Kelik (Sintang); usul pembangunan PLBN di wilayah Temajuk yang tidak direspon; adanya *outstanding border problem* masih menyulitkan patroli perbatasan.

Beberapa isu strategis di bidang demografi Provinsi Kalimantan Barat antara lain kepadatan penduduk relatif rendah; usia harapan hidup di bawah rata-rata nasional.

b. Aspek Ideologi, Politik dan Hukum

Secara umum, masyarakat Kalimantan Barat masih menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin dari kerukunan hidup beragama, solidaritas sosial dan terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Dinamika kehidupan politik berjalan normal. Namun demikian minimnya infrastruktur seperti transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, kelistrikan yang menjadi cerminan perhatian pemerintah masih kurang, terutama untuk masyarakat perbatasan yang menikmati fasilitas dari pemerintah Malaysia, sehingga perhatian lebih perlu diberikan untuk menjaga loyalitas masyarakat dengan NKRI.

Masyarakat pada umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, saling menghargai perbedaan, meski masih ada sedikit tensi antara masyarakat pesisir melayu dengan masyarakat pedalaman, tetapi tidak berpotensi untuk menimbulkan perpecahan etnis. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya dan pentingnya untuk menjaga persatuan dan toleransi. Hal ini tercermin dari aktivitas dialog antara forum-forum keagamaan dan antar suku sebagai sarana untuk bertukar pikiran dan mencari upaya bersama untuk membangun SDA dan SDM Kalimantan Barat.

Pada aspek penegakan hukum, isu strategis yang menarik perhatian antara lain tingginya penyelundupan narkoba; tingginya Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang berasal dari non Kalimantan Barat. Umumnya, warga yang terlibat dalam kasus PMI berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Dan sejak pandemi, permintaan PMI meningkat dan menggunakan jalur tikus di perbatasan.

c. Aspek Ekonomi dan Potensi Kekayaan Alam

Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 (c-to-c) mengalami kontraksi sebesar 1,82 persen, kontras dengan tahun 2019 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Meski demikian, beberapa sektor usaha tetap tumbuh positif seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (26,81%), Pertambangan dan Penggalian (21,23%), dan Perdagangan Listrik dan Gas (12,68%). Beberapa isu strategis di isu ekonomi adalah:

Pelambatan Laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia; penurunan realisasi pendapatan negara; perkembangan nilai komoditi ekspor sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia; pembatasan ekspor bahan tambang terutama

bauksit akibat kebijakan/regulasi nasional; rendahnya daya saing produk daerah tingginya biaya distribusi; rendahnya kemampuan sumberdaya manusia lokal dalam memanfaatkan teknologi sarana penangkapan dan adaptasi terhadap anomali iklim; belum berkembangnya hilirisasi produk perikanan; belum selesainya penataan batas kawasan hutan sehingga menyebabkan konflik kepentingan masyarakat di sekitar hutan; laju degradasi hutan dan lahan masih terjadi; pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi belum optimal mengingat hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam sektor pariwisata, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain: rendahnya inovasi penggerak pariwisata, keterbatasan akses infrastruktur serta kurangnya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif menjadikan sektor pariwisata belum tergarap dengan baik.

d. Aspek Sosial Budaya

Kehidupan sosial-budaya di kawasan perbatasan sampai saat ini masih dalam tahap kehidupan yang normal. Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia, pada prinsipnya adalah masyarakat serumpun yang memiliki akar budaya yang sama. Aspek kesejahteraan sosial khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan masih membutuhkan atensi. Beberapa isu-isu strategis bidang sosial budaya adalah meliputi:

Tingginya ketergantungan warga perbatasan dengan Malaysia terkait kebutuhan barang pokok; banyaknya masyarakat Indonesia di perbatasan yang memilih berobat ke Malaysia; Status kesehatan ibu dan anak masih rendah; Status gizi masyarakat masih rendah; Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas; akses masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang baik masih mengalami kendala dan kesenjangan; mutu dan relevansi pendidikan masih terbilang rendah; tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19.

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Kalbar merupakan wilayah Kodam XII/Tanjung Pura yang bemarkas di Kabupaten Kubu Raya. Untuk urusan pertahanan dan keamanan perairan, Lantamal XII bemarkas di Pontianak. Sedangkan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat sipil, Polda Kalbar membawahi 12 Polres. Khusus untuk penjagaan perbatasan dilibatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang melibatkan 2 batalion yang langsung dikelola Mabes TNI.

Pengelolaan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh PLBN yang berada dalam koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Beberapa isu strategis bidang pertahanan dan keamanan antara lain adanya wilayah hutan lindung di perbatasan yang sulit dijaga; minimnya infrastruktur pendukung; minimnya sarana telekomunikasi; ketiadaan SOP terkait pertahanan/kedaruratan di PLBN untuk skenario pendudukan strategis/terburuk.

5. Gambaran Umum Kawasan Perbatasan RI-Malaysia Entikong

Kecamatan Entikong memiliki luas wilayah 506,89 km² atau sekitar 3,94

persen dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Kecamatan Entikong terdiri dari lima desa, dimana desa Suruh Tembawang merupakan desa terluas yang ada di Kecamatan Entikong, dengan luas mencapai 148,82 Km² atau sekitar 29,36 persen dari total luas wilayah kecamatan Entikong. Pada tahun 2020, Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa, 34 dusun, dan 90 RT. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Kecamatan Entikong berjumlah 17.697 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 9.171 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.526 jiwa. Desa Entikong menjadi desa dengan penduduk paling banyak, dimana sebanyak 8.635 jiwa tinggal di Desa Entikong sedangkan Desa Pala Pasang menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 1.106 jiwa.

a. Keunggulan Geoekonomi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan barang dan jasa masyarakat, aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Entikong mengalami peningkatan. Setidaknya ada empat komoditas produk Kalbar yang dibutuhkan di Serawak, Malaysia, yaitu: komoditas hortikultura seperti buah dan sayur, komoditas perikanan seperti ikan hias dan ikan konsumsi, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi serta komoditas tanaman pangan seperti beras dan jagung. Hal ini bisa ditandai dengan adanya tren peningkatan ekspor ke Malaysia melalui Entikong hingga sebelum masa Pandemi Covid-19. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan *lockdown* di Malaysia pada tahun 2020, perdagangan lintas negara berhenti total. Dan baru pada awal April 2022, kebijakan *lockdown* dicabut dan perdagangan lintas negara sudah mulai bangkit kembali.

b. Keunggulan Geostrategis

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya mewujudkan hak kedaulatan NKRI. Karena itu, pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya memiliki keterkaitan dengan penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga yang memiliki nilai strategis bagi nusantara. Pengembangan kawasan perbatasan juga memiliki arti penting dalam memperkuat ketahanan bangsa. Dengan membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, ketimpangan akibat lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat diperkecil. Peningkatan perhatian terhadap jaringan, mobilitas dan arus perpindahan barang dan orang menjadi krusial dalam memahami konteks penguatan wilayah perbatasan secara komprehensif.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2016, PLBN Entikong memiliki dua fasilitas utama:

- Bangunan inti seperti perkantoran PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina, dan pengamanan
- Bangunan penunjang seperti Wisma Indonesia, tempat ibadah, pertokoan, rumah makan dan klinik

Di samping itu, negara juga semakin mengencarkan pembangunan untuk menunjang keberadaan PLBN, mulai dari jalan utama, puskesmas, pasar tradisional, hingga Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong. Dengan kata lain, pembangunan ini semakin menggarisbawahi arti strategis Entikong sebagai salah

satu simpul kegiatan perekonomian. Aktivitas perdagangan melalui pos lintas batas ini sangat berpotensi, dikarenakan posisi letak geografisnya, kecamatan Entikong menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar negara.

Hadirnya *Master Plan of Asean Community* yang menghubungkan jalur perdagangan antara negara-negara ASEAN, Entikong dengan PLBN Entikong berpotensi menjadi pelabuhan darat (*dry port*) untuk kegiatan ekspor-impor. Potensi ini didukung dengan keberadaan Pelabuhan internasional Kijing, yang dalam waktu dekat akan diresmikan, yang kelak menjadi pelabuhan penghubung Kalbar dengan negara-negara sekitar. Konektivitas antara PLBN Entikong dan pelabuhan internasional Kijing dapat menunjang sarana dan prasarana umum dan kenaikan ekonomi masyarakat Entikong, serta kredibilitas Kalbar di mata investor internasional.

6. Persoalan-persoalan yang menonjol di wilayah perbatasan Entikong:
 - a. Tingginya tuntutan keberadaan infrastruktur penunjang yang layak di kawasan seperti transportasi, telekomunikasi dan jalan
 - b. Tingginya kebutuhan peningkatan kualitas layanan ekonomi dan sosial seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan
 - c. Tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas dan penunjang aparat keamanan untuk menangani kejahatan lintas batas

BAB III ANALISIS

7. Analisis Terhadap Pokok Persoalan

- a. Tingginya tuntutan keberadaan infrastruktur penunjang yang layak di kawasan seperti listrik, telekomunikasi, transportasi, dan jalan.
 - 1) Dukungan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah berjalan melalui pembangunan infrastuktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan. Namun masyarakat di perbatasan yang berada di pedalaman dan jauh dari akses masuk kedua negara masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sarana dan prasarana yang belum memadai serta infrastruktur jalan belum optimal menghubungkan dengan wilayah lain menjadikan kebutuhan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya masih didatangkan dari Malaysia, yang memiliki akses jalan lebih baik.
 - 2) Kedaulatan energi di perbatasan masih butuh diperkuat mengingat pemenuhan kebutuhan energi listrik di perbatasan belum tercukupi secara optimal. Tercatat, pada tahun 2020, ada dua dari lima desa di Kecamatan Entikong yang belum berlangganan listrik dari PLN yaitu Desa Suruh Tembawang dan Desa Pala Pasang. Sejauh ini, pemenuhan kebutuhan energi listrik di kawasan perbatasan didapatkan melalui importasi dari Malaysia yakni Sanggau SESCO 20 KV Entikong-Tebedu sebanyak 1.200 KW. Fenomena

serupa juga terjadi di kawasan perbatasan lainnya di Kalbar seperti Badau, Aruk dan Bengkayang yang juga melakukan importasi listrik dari Malaysia guna pemenuhan kebutuhan listrik.

- 3) Masih terdapat cukup banyak kawasan yang belum tersedia jaringan komunikasi. Secara umum, hingga tahun 2021, setidaknya terdapat 295 dari 856 dusun di Kabupaten Sanggau yang masih belum memiliki jaringan telekomunikasi. Sejauh ini telah dibangun 24 titik *Base Transceiver Station* (BTS) untuk jaringan 4G di Kabupaten Sanggau. Selain itu, 46 lokasi bantuan penangkap sinyal untuk membantu kantor desa atau sekolah-sekolah yang kesulitan jaringan komunikasi juga telah dibangun. Namun, kondisi tersebut masih belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat mendapatkan akses telekomunikasi yang lebih baik. Pada tahun 2020 jumlah menara telepon seluler di Kecamatan Entikong sebanyak 19 menara dan hanya Desa Entikong yang memiliki sinyal sangat kuat dari lima desa yang berada di bawah Kecamatan Entikong.
- 4) Peningkatan dukungan listrik dan telekomunikasi juga dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan. Setidaknya tercatat ada 29 pos pengamanan perbatasan yang melintasi tiga kabupaten: Sanggau, Sambas dan Bengkayang. Akan tetapi, tidak semua pos tersebut didukung infrastruktur memadai. Hal ini berakibat pada pengelolaan komando-pengendalian (Kodal) terhadap pos perbatasan kurang berjalan secara optimal. karena sarana komunikasi tidak optimal
- 5) Dalam hal infrastruktur jalan, menurut data dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, pada tahun 2020 panjang jalan kabupaten yang terdapat di Kecamatan Entikong sudah mencapai 15,57 km. Namun, kondisi jenis permukaan jalan tidak merata. Hanya tiga dari 5 desa yang memiliki jenis permukaan jalan aspal/beton sehingga selalu dapat digunakan sepanjang tahun. Sementara khusus untuk Desa Suruh Tembawang dan Pala Pasang, jalan tidak dapat digunakan pada musim penghujan mengingat kondisi permukaan jalan belum diaspal. Selain itu, akses TBI ke PLBN Entikong juga belum didukung jalur khusus truk. Kebutuhan jalur khusus ini dibutuhkan agar tidak merusak jalan yang ada. Jika truk diizinkan menggunakan jalur transportasi darat biasa dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran lalu lintas barang.
- 6) Sarana pendukung transportasi juga butuh peningkatan. Hanya dua dari lima desa di Kecamatan Entikong yang memiliki trayek angkutan umum, yakni Desa Semanget dan Desa Entikong. Sementara Desa Nekan, Desa Suruh Tembawang dan Desa Pala Pasang tidak memiliki trayek angkutan umum. Ketiadaan transportasi ini menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan barang pokok. Selain itu, harga barang pokok di daerah yang tidak memiliki transportasi umum menjadi lebih mahal. Selain itu, tidak beroperasinya transportasi lintas negara menjadikan warga di perbatasan cukup kesulitan untuk mobilitas. Angkutan umum lintas negara belum diaktifkan kembali karena belum ada izin beroperasi yang berlaku

secara resiprokal. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia bahwa untuk perizinan angkutan umum lintas negara ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, bukan pemerintah provinsi. Keberadaan birokrasi yang panjang menyulitkan proses reaktivasi angkutan umum lintas negara.

b. Tingginya kebutuhan peningkatan kualitas layanan ekonomi dan sosial seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan

- 1) Sejauh ini, PLBN belum ditetapkan menjadi pintu ekspor-impor. Ketidaksinkronan regulasi perdagangan lintas batas menjadikan kawasan perbatasan kurang optimal untuk tumbuh sebagai salah satu sentra ekonomi. Hal ini disebabkan Kementerian Perdagangan masih menganggap PLBN sebagai merupakan pintu perdagangan tradisional. Padahal, di PLBN Entikong sudah dibangun terminal barang internasional. Untuk diketahui, ekspor tertinggi Kalimantan Barat ke Sarawak adalah komoditas perkebunan terutama kelapa sawit (CPO). Sementara, guna meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan, keberadaan status kawasan hutan lindung dianggap memberikan tantangan tersendiri. Perluasan lahan untuk investasi dihadapkan pada upaya mempertahankan Kawasan hutan untuk mengurangi laju deforestasi. Perkembangan Investasi masih dihadapkan pada kendala belum tersedianya secara memadai dukungan energi listrik dan jaringan komunikasi
- 2) Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan masih belum memadai untuk menutupi tingginya tuntutan masyarakat. Hingga tahun 2020, tercatat setidaknya ada 1 unit Puskesmas, 1 unit Puskesmas Pembantu, 1 unit Puskesmas Keliling, 31 unit Posyandu, 5 unit Polindes, 1 unit Poskesdes, dan 1 apotek di Kecamatan Entikong. Selain itu terdapat 2 unit Praktek Bidan di Kecamatan Entikong. Fasilitas kesehatan tersebut ditunjang dengan keberadaan 24 orang tenaga medis dan paramedis yang terdiri dari 7 orang bidan, 9 orang perawat, 8 orang tenaga medis lainnya di Kecamatan Entikong. Pemerintah hingga kini masih melakukan pembangunan 1 unit rumah sakit. Akan tetapi, pendanaan pembangunan tersebut terganggu akibat Pandemi Covid-19. Sementara jarak rumah sakit lengkap yang tersedia adalah di Pontianak. Akibatnya, warga di perbatasan kerap melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan di Kuching, Malaysia, mengingat lokasi ini lebih dekat dan relatif mudah diakses. Tercatat sekitar 5 ribu WNI pertahun melintas batas untuk kebutuhan layanan kesehatan. Kesulitan yang sama juga dirasakan saat merujuk pasien PMI ke rumah sakit terdekat di perbatasan. Minimnya fasilitas kesehatan terdekat menjadikan kondisi kesehatan pasien makin menurun.
- 3) Kondisi serupa juga terjadi pada layanan pendidikan. Ketersediaan, baik dari kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana pendidikan berikutan dengan tenaga pengajarnya masih butuh ditingkatkan. Selain itu, sebaran dari ketersediaan layanan pendidikan juga tidak merata di seluruh desa di Kecamatan Entikong. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 20 SD/MI, 6 SMP/MTs, dan 2 SMK di Kecamatan Entikong. Dari total 28 sekolah dari

seluruh jenjang pendidikan, terdapat 2 sekolah swasta dan 26 sekolah negeri. Data BPS (2020) melansir hanya Sekolah Dasar yang terdapat di semua desa. Sementara untuk SMP dan SMK tidak tersebar di semua desa. Bahkan, tidak ada satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berdiri di Kecamatan Entikong. Di sisi kualitas layanan pendidikan, baik SD hingga SMA masih membutuhkan peningkatan yang signifikan. Kurangnya dukungan anggaran APBD merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam rendahnya kualitas pendidikan dasar di Entikong. Selain itu, kemudahan akses peserta didik ke sarana pendidikan juga masih membutuhkan perhatian. Untuk Desa Suruh Tembawang dan Pala Pasang, peserta didik masih sangat kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan yang ada. Fenomena serupa juga terjadi pada ketersediaan guru. Umumnya guru hanya lebih banyak berada pada Desa Entikong. Akibatnya, kesenjangan ketersediaan guru terjadi cukup signifikan. Keterlibatan prajurit TNI yang bertugas sebagai pengaman perbatasan untuk menjadi guru darurat patut diapresiasi. Akan tetapi, hal tersebut masih belum memadai untuk menutup gap kesenjangan ketersediaan guru, mengingat keterlibatan prajurit sebagai tenaga pendidik di daerah terpencil hanya bersifat ad hoc.

c. Tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas dan penunjang aparat keamanan untuk menangani kejahatan lintas batas

- 1) Kejahatan lintas batas yang masih marak adalah penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan pembalakan liar. Sepanjang tahun 2020, Polsek Entikong setidaknya menangani 12 tindak pidana kejahatan, dan 7 diantaranya merupakan terkait kasus narkoba. Dalam hal ini, penyelundupan narkoba dalam jumlah yang besar, umumnya dengan menggunakan jalur tikus. Terkadang, kurir yang membawa narkoba tersebut merupakan PMI. Sementara, terkait kasus perdagangan orang, sepanjang tahun 2020-21, Polda Kalbar tercatat telah menangani 16 kasus, sementara, angka kejahatan pembalakan ilegal masih terbilang tinggi yakni 33 kasus pada tahun 2021 dan 39 kasus pada tahun 2020. Selain oleh perorangan/masyarakat, pembalakan ilegal juga dilakukan oleh perusahaan yang dalam proses *land clearing*.
- 2) Mengatasi jalan keluar-masuk tidak resmi/ilegal di perbatasan juga memiliki tantangan yang cukup besar. Dari 972,95 km panjang perbatasan, setidaknya ada sekitar 360 kilometer wilayah perbatasan yang tidak dapat dikelola karena merupakan wilayah hutan lindung. Setidaknya hingga kini ada 17 jalan tikus/ilegal yang telah teridentifikasi. Dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat .
- 3) Dalam hal maraknya penyelundupan narkoba yang melibatkan PMI sebagai kurir, Polda Kalbar sebenarnya telah menugasi Babinkamtibmas untuk melakukan pengarahannya ke masyarakat. Pendekatan serupa juga dilakukan Kodim Sanggau dan Satgas Pamantas kepada masyarakat di perbatasan melalui pembinaan kewilayahan bersama pemuda dan tokoh masyarakat serta kegiatan berupa sosialisasi. Namun, pendekatan ini tidak berjalan efektif mengingat kurangnya anggaran serta pendampingan untuk peningkatan

keterampilan ataupun pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Umumnya, motivasi warga menjadi PMI adalah guna memperbaiki kualitas hidup. Dan angka deportasi sendiri mengalami kecenderungan peningkatan. Tercatat, setidaknya 2-3 PMI dideportasi setiap bulannya dari Malaysia setelah menjalani hukuman.

- 4) Selain itu, kebutuhan fasilitas penunjang yang berbasis teknologi dalam pengungkapan kasus kriminal di kawasan perbatasan juga dirasakan semakin meningkat. Ketersediaan teknologi akan membantu pengungkapan kasus termasuk kasus penyelundupan narkoba mengingat terkadang Pengendali penyelundupan narkoba berasal dari tahanan lepas di luar Entikong
- 5) Dalam pertemuan Pembahasan ke-7 Border Crossing Agreement Indonesia dan Malaysia di Bandung pada Juni lalu, disetujui ada 9 pintu keluar masuk RI-Malaysia di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Temajuk. Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan Pembangunan PLBN di Temajuk (Kabupaten Sambas), mengingat Pihak Malaysia sudah membangun Pos Kawalan Sempadan di Telok Melano (*counterpart* Temajuk). Konjen RI di Kuching, Malaysia juga telah menyurati Menlu RI untuk memprioritaskan pembangunan PLBN Temajuk. Kabupaten Sambas sendiri telah memiliki 1 PLBN yakni PLBN Aruk yang diresmikan Presiden Joko Widodo 17 Maret 2017. Untuk diketahui, Desa Temajuk berdekatan dengan wilayah Tanjung Datu yang pernah ramai terkait sengketa batas wilayah dengan Malaysia. Kawasan Temajuk selama ini terkenal dengan keindahan pantai (pariwisata). Wilayah ini juga memiliki potensi perikanan laut dan di masa mendatang berpotensi untuk menjadi sengketa mengingat masih ada beberapa pulau di wilayah tersebut belum ada penduduk. Sejauh ini belum ada respon terkait usul pembuatan PLBN Temajuk. Selama ini, untuk pembangunan PLBN membutuhkan adanya dasar hukum sebuah Instruksi Presiden (Inpres).
- 6) Terkait kekuatan pertahanan, sejauh ini sudah ada Pos TNI AL di kawasan Temajuk. Lantamal XII/Pontianak sendiri sudah berencana melakukan penambahan pangkalan TNI AL di Kabupaten Sambas (Lanal Sambas). Akan tetapi, khusus daerah Temajuk, karakteristik pantai berbatu cukup menjadi tantangan dalam pembuatan dermaga, jika daerah ini kelak diputuskan menjadi markas Lanal Sambas. Sementara pengawasan orang asing di Temajuk dilakukan dengan penguatan komunikasi sosial mengingat hubungan kekerabatan masyarakat lokal sangat tinggi.
- 7) Dalam hal pembinaan masyarakat perbatasan guna memperkuat pengawasan perbatasan, telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Selain guna meningkatkan kesadaran cinta tanah air, pembinaan masyarakat ini ditujukan untuk membantu aparat keamanan dalam pengelolaan batas wilayah serta penanganan kamtibmas, mengingat jumlah aparat dan fasilitas pendukung yang masih butuh penambahan. Langkah rekrutmen putra daerah sebagai calon prajurit TNI/Polri juga merupakan

terobosan baik. Meski demikian, kontinuitas dari kebijakan tersebut masih butuh penguatan dan dukungan terutama ketersediaan alokasi dan anggaran.

- 8) Di sisi lain, pengelolaan PLBN juga membutuhkan penguatan yang signifikan. Sinkronisasi tugas pengelolaan perbatasan menjadi terkendala karena PLBN berada langsung di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi koordinatif. Selain itu, ketiadaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Administrator PLBN menjadikan standarisasi layanan satu atap menjadi sulit dilakukan. Ego sektoral antar pemangku kepentingan yang terlibat di dalam PLBN menjadikan kendala ataupun problem di lapangan menjadi kurang efisien untuk diselesaikan. Ketidakterdediaan standar administrasi baku bersama menjadikan layanan pemberkasan PLBN belum sehingga tidak ada standar waktu pelayanan administrasi keluar masuk. Selain itu, PLBN juga belum mengintegrasikan kebutuhan pendekatan pertahanan keamanan.

BAB IV PENUTUP

8. Kesimpulan

Problematika pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat terutama di Entikong sangat kompleks. Sebagai salah satu beranda depan Indonesia dan merupakan salah satu kawasan strategis nasional, pengelolaan perbatasan Entikong memiliki tantangan multi dimensi. Upaya mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah sekitar membutuhkan inisiatif-inisiatif baru dari para pemangku kepentingan. Di sisi lain, penanganan kejahatan lintas batas juga membutuhkan pengayaan pendekatan, tidak hanya penguatan pemanfaatan teknologi dalam aspek penegakan hukum tetapi juga dibutuhkan adopsi pendekatan kesejahteraan guna memaksimalkan upaya pencegahan. Dalam hal ini, penanganan masalah kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi dan pendidikan juga menjadi krusial.

Kawasan Entikong memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu contoh sentra ekonomi besar terutama pintu ekspor-impor, mengingat Kalimantan Barat akan memiliki TBI Entikong dan Pelabuhan Internasional Kijing. Penyiapan regulasi dan infrastruktur pendukung yang menghubungkan dua aset ini menjadi tidak bisa ditunda. Dengan kata lain, persepsi PLBN hanya sebagai pasar tradisional lintas negara harus diubah. Dan langkah tersebut dimulai dari pemerintah pusat.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kompleksitas problem di kawasan perbatasan. Dalam konteks tersebut, pengayaan program pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan membutuhkan komitmen dan keseriusan para pemangku kepentingan. Sejatinya kedaulatan dan kehadiran negara penting untuk dipastikan ada di perbatasan. Ketergantungan sektor kunci di perbatasan terhadap pasokan dari negara tetangga seperti energi dan bahan pokok adalah sebuah alarm yang tidak bisa dibiarkan.

9. Rekomendasi.

- a. Dalam memenuhi tuntutan keberadaan infrastruktur penunjang yang layak di kawasan Entikong, direkomendasikan kepada Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeneg BUMN, Mabes Polri, Pemda bersinergi untuk :
- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas logistik dan transportasi yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan kawasan penyangga
 - 2) Mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di kawasan perbatasan
 - 3) Meningkatkan laju pembangunan jaringan komunikasi guna mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi di kawasan perbatasan
 - 4) Memperkuat infrastruktur pendukung di pos satgas pamtas
 - 5) Mendorong percepatan pembebasan lahan untuk menyiapkan infrastruktur jalan bagi kebutuhan lalu lintas barang antar negara
 - 6) Meninjau kembali pengurusan izin transportasi umum lintas negara serta menyederhanakan proses perizinan angkutan publik lintas negara
 - 7) Meninjau kembali pemberlakuan STNK Lintas Negara dengan mempertimbangkan kebijakan yang sifatnya resiprokal
- b. Dalam merespon tingginya kebutuhan peningkatan kualitas layanan ekonomi dan sosial, direkomendasikan kepada Kementerian Perdagangan, Kemenkes, Kemendikbud, Kemendes, Kemenhut dan LK, Kemeneg BUMN dan Pemda bersinergi untuk:
- 1) Meninjau kembali regulasi terkait perdagangan tradisional di kawasan perbatasan
 - 2) Meninjau kembali status kawasan hutan lindung di kawasan perbatasan
 - 3) Menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah prioritas pengiriman dokter PTT
 - 4) Mengarahkan program CSR BUMN untuk kawasan perbatasan
 - 5) Meningkatkan pemberian insentif khusus bagi guru-guru dan dokter serta tenaga kesehatan yang bekerja di kawasan perbatasan
 - 6) Meningkatkan kemudahan fasilitas dan insentif bagi pebisnis maupun investor yang ingin berinvestasi di sektor pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan
- c. Dalam menutupi tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas dan penunjang aparat keamanan di kawasan perbatasan, direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemensos, Mabes TNI, Mabes Polri dan Pemda bersinergi untuk:
- 1) Meningkatkan kapasitas institusi dan personel aparat keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan dengan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih

- 2) Meningkatkan penggunaan pesawat nir awak dan peralatan yang mengadopsi teknologi baru untuk memaksimalkan pengawasan perbatasan
- 3) Meningkatkan keberadaan proyek padat karya serta program pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan
- 4) Meningkatkan pengelolaan lapas terutama narapidana kasus narkoba
- 5) Meninjau usul kebutuhan pendirian PLBN Temajuk
- 6) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang kekuatan pertahanan
- 7) Meningkatkan jumlah penyelenggaraan kegiatan berbasis nasional di kawasan perbatasan
- 8) Meninjau kewenangan administrator dan pengelolaan PLBN

Jakarta, Juni 2022
Ketua Tim Kajida,

Udyatmiko
Laksamana Muda TNI